

KABUPATEN KAMPAR



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

**Semester II (Juli – Desember)
Tahun 2021**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
D. KERANGKA ALUR.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN	7
A. VISI	7
B. MISI.....	7
C. SASARAN	7
D. MANAJEMEN PELAYANAN.....	7
E. MOTTO PELAYANAN.....	8
F. STANDAR PELAYANAN	8
G. PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK.....	9
H. JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DITERBITKAN.	16
I. SUMBER DAYA MANUSIA.....	17
J. SARANA DAN PRASARANA	17
K. LAYANAN PENGADUAN	28
L. INOVASI.....	31
M. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	31
BAB III PENUTUP	33
A. KESIMPULAN	33
B. SARAN	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Laporan.....	5
Gambar 2. Logo Motto Pelayanan	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem Aplikasi SICANTIK	10
Tabel 2. Daftar Perizinan dan NonPerizinan menggunakan Sistem Aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS).....	14
Tabel 3. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Per-Sektor pada Semester II (Juli - Desember) Tahun 2021	19
Tabel 4. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Per-Kecamatan Se-Kabupaten Kampar pada Semester II (Juli - Desember) Tahun 2021.	20
Tabel 5. Kasus Pengaduan Semester II (Juli - Desember) Tahun 2021 .	29
Tabel 6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II (Juli - Desember) Tahun 2021.....	32
Tabel 7. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Semester II (Juli) Tahun 2021 .	34
Tabel 8. Perorangan dan Non-Perorangan Semester II (Juli) Tahun 2021	34
Tabel 9. Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kab. Kampar Semester II (Agustus - Desember) Tahun 2021	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terjadi penyederhanaan Regulasi yang di dalamnya terdapat 11 Klaster :

1. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha.
2. Perizinan Berusaha.
3. Ketenaga Kerjaan.
4. Dukungan Koperasi dan UMKM.
5. Dukungan Riset dan Inovasi.
6. Pengadaan Lahan.
7. Kawasan Ekonomi.
8. Kemudahan Berusaha.
9. Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan PSN.
10. Administrasi Pemerintah, dan
11. Pengenaan Sanksi.

Dari 11 Klaster tersebut, terdapat klaster Perizinan Berusaha yang saat ini telah diamanatkan di Undang-undang Cipta Kerja yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sebut OSS RBA. OSS RBA adalah portal satu pintu perizinan investasi. OSS RBA merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha yang di nilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kampar telah menerapkan Sitem OSS RBA yang juga melibatkan OPD Teknis terkait perizinan berusaha. Saat ini OPD Teknis telah memiliki masing-masing Hak Akses Turunan OSS RBA,

dimana DPMPTSP Kab. Kampar sebagai pengelola Hak Akses OSS RBA.

OPD Teknis yang memegang Hak Akses Turunan diantaranya :

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar
- b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kampar
- c. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Kampar
- d. Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar
- e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Kampar
- f. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kampar
- g. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Kampar
- h. Dinas Kesehatan Kab. Kampar
- i. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Kampar
- j. Dinas Perikanan Kab. Kampar
- k. Dinas Perhubungan Kab. Kampar
- l. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kampar

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi :

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Non KBLI
- c. Perizinan Non Berusaha Non KBLI
- d. Non Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kampar masih menggunakan system aplikasi OSS RBA dan SICANTIK Cloud dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang tercakup dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kampar memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan tugas pokok dan fungsi 2 (dua) bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A;

- a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III
2. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B;
- a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/III

Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Inovasi Layanan serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kampar merupakan faktor teramat penting dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan diantaranya Sarana Prasarana, Penggunaan Sistem, Kemampuan (Penguasaan Teknologi)/Aplikasi Petugas Layanan dan Kecepatan Waktu dalam pelayanan perizinan. Untuk itu perlu adanya Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di setiap semester guna memberi informasi dan sebagai bahan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kampar untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Republik Indonesai Nomor 11 Nomor 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektornik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Pemerintah Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan;
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar

18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

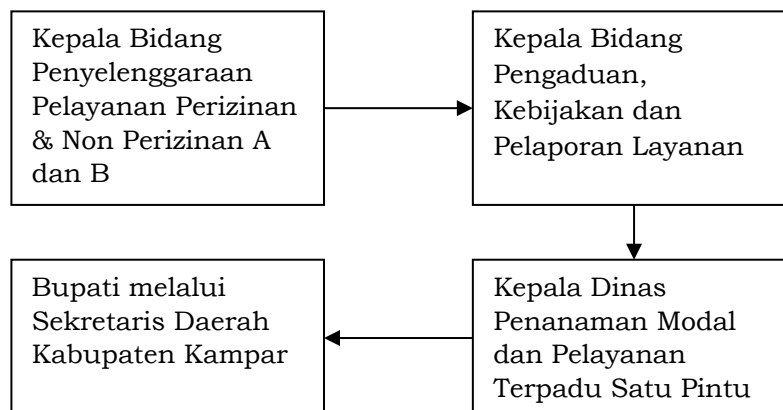
Untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

2. Tujuan :

Sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan perkembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sehingga dapat diupayakan solusi (jalan keluar) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

D. KERANGKA ALUR

Proses pelaksanaan pembuatan laporan Perizinan dan NonPerizinan yang sudah dikeluarkan berdasarkan mekanisme sebagai berikut :



Gambar 1. Mekanisme Laporan

Keterangan:

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & NonPerizinan A dan B menyampaikan laporan realisasi jumlah izin yang telah dikeluarkan kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
2. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memerintahkan Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan untuk melakukan rekapitulasi data jumlah izin bulanan berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar membuat laporan perkembangan Perizinan & Non Perizinan A dan B setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN

A. VISI

“Prima dalam pelayanan Investasi, menuju Kabupaten Kampar mandiri”.

B. MISI

1. Memantapkan perekonomian daerah melalui kemudahan berinvestasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Memantapkan tata kelola administrasi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. SASARAN

Terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegrasi dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan.

D. MANAJEMEN PELAYANAN

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menerapkan Manajemen Pelayanan yang meliputi:

1. Perencanaan pelayanan;
2. Pelaksanaan pelayanan;
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Pengawasan internal;
5. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan pelayanan konsultasi;
6. Monitoring dan evaluasi dan;
7. Pelaporan pelayanan.

E. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan adalah “IZIN CEPAT, CEPAT UNTUNG” yang diharapkan penerima layanan dan pemberi layanan akan merasakan layanan yang menyenangkan.



Gambar 2. Logo Motto Pelayanan

F. STANDAR PELAYANAN

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Komponen standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar diantaranya:

1. Standar Pelayanan (*Service*) :
 - a. Persyaratan
 - b. Sistem Mekanisme, Prosedur
 - c. Jangka Waktu Pelayanan
 - d. Biaya Tarif
 - e. Produk Pelayanan
 - f. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

2. Standar Pelayanan (*Manufacturing*) :
 - a. Dasar Hukum
 - b. Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas
 - c. Kompetensi Pelaksana
 - d. Pengawasan Internal
 - e. Jumlah Pelaksana
 - f. Jaminan Pelayanan
 - g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
 - h. Evaluasi Kinerja Pelaksana

G. PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar melakukan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan menggunakan metode Pelayanan Secara Elektronik (PSE). Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar melaksanakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) dengan 2 (dua) system aplikasi yaitu *Online Single Submission (OSS RBA)* dan *SICANTIK Cloud* yang dapat di akses melalui *website*: oss.go.id dan sicantikui.layanan.go.id.

PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan PSE dapat melalui berbagai macam Aplikasi yang sudah terintegrasi dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat 134 Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani dengan PSE yaitu OSS dan SICANTIK Cloud.

Tabel 1. Daftar Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem Aplikasi SICANTIK Cloud

No	Perizinan dan Non Perizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui
1	2	3	4
1	Izin Reklame	Izin Usaha	SICANTIK
2	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	Izin Usaha	SICANTIK
3	Izin Praktik Dokter	Izin Usaha	SICANTIK
4	Izin Praktik Bidan	Izin Usaha	SICANTIK
5	Izin Praktik Perawat	Izin Usaha	SICANTIK
6	Izin Praktik Fisioterapis	Izin Usaha	SICANTIK
7	Izin Praktik Radiografer	Izin Usaha	SICANTIK
8	Izin Perekam Medis	Izin Usaha	SICANTIK
9	Izin Kerja/ Praktik Tenaga Gizi	Izin Usaha	SICANTIK
10	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi	Izin Usaha	SICANTIK
11	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	Izin Usaha	SICANTIK
12	Izin Praktik Apotek	Izin Usaha	SICANTIK
13	Izin Praktik Penata Anastesi	Izin Usaha	SICANTIK
14	Izin Kerja Refraksionis Optisien	Izin Usaha	SICANTIK
15	Izin Elektromedis	Izin Usaha	SICANTIK
16	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	Izin Usaha	SICANTIK
17	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Izin Usaha	SICANTIK
18	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	Izin Usaha	SICANTIK
19	Izin Prektik Tenaga Teknis Kefarmasian	Izin Usaha	SICANTIK
20	Izin Tukang Gigi	Izin Usaha	SICANTIK
21	Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang	Izin Usaha	SICANTIK
22	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga	Izin Usaha	SICANTIK
23	Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan & Restoran	Izin Usaha	SICANTIK
24	Izin Kerja Praktik Terapi Wicara	Izin Usaha	SICANTIK
25	Izin Kerja Teknisi Gigi	Izin Usaha	SICANTIK
26	Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet	Izin Usaha	SICANTIK
27	Ketetapan UKL-UPL/DPLH	Izin Usaha	SICANTIK

Laporan Semester II Juli - Desember 2021
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1	2	3	4
28	Ketetapan AMDAL/DELH	Izin Usaha	SICANTIK
29	Ketetapan KA-ANDAL	Izin Usaha	SICANTIK
30	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Izin Usaha	SICANTIK
31	Izin lind Aplikasi (LA)	Izin Usaha	SICANTIK
32	Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/ Pemberian Izin Terhadap Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G)	Izin Usaha	SICANTIK
33	Izin Jasa Titipan untuk Kantor Agen	Izin Usaha	SICANTIK
34	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cukupan Areanya Kab./ Kota sepanjang tidak menggunakan Spektrum Radio	Izin Usaha	SICANTIK
35	Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator	Izin Usaha	SICANTIK
36	Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi dalam Satu Kabupaten/ Kota	Izin Usaha	SICANTIK
37	Izin Instalasi Penangkal Petir	Izin Usaha	SICANTIK
38	Izin Instalasi Genset	Izin Usaha	SICANTIK
39	Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/ atau Televisi	Izin Usaha	SICANTIK
40	Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Izin Usaha	SICANTIK
41	Izin Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Izin Usaha	SICANTIK
42	Izin Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Izin Usaha	SICANTIK
43	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol. B dan C untuk Pengecer dan Penjual langsung Minum di Tempat	Izin Usaha	SICANTIK
44	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPT)	Izin Usaha	SICANTIK

Laporan Semester II Juli - Desember 2021
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1	2	3	4
45	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Usaha Toko Modern (IUTM)	Izin Usaha	SICANTIK
46	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Izin Usaha	SICANTIK
47	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman	Izin Usaha	SICANTIK
48	Izin Usaha Bidang Perumahan	Izin Usaha	SICANTIK
49	Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti	Izin Usaha	SICANTIK
50	Izin Trayek Angkutan Pemukiman	Izin Usaha	SICANTIK
51	Izin Operasi Angkutan Pariwisata	Izin Usaha	SICANTIK
52	Izin Operasi Angkutan Lingkungan	Izin Usaha	SICANTIK
53	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum	Izin Usaha	SICANTIK
54	Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi	Izin Usaha	SICANTIK
55	Izin Pembuatan Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau	Izin Usaha	SICANTIK
56	Izin Trayek Angkutan Kota	Izin Usaha	SICANTIK
57	Izin Trayek Angkutan Pedesaan	Izin Usaha	SICANTIK
58	Izin Trayek Angkutan Perbatasan	Izin Usaha	SICANTIK
59	Izin Trayek Angkutan Karyawan	Izin Usaha	SICANTIK
60	Izin Trayek Angkutan Pemadu Moda	Izin Usaha	SICANTIK
61	Izin Trayek Angkutan Taksi	Izin Usaha	SICANTIK
62	Izin Trayek Angkutan Sewa	Izin Usaha	SICANTIK
63	Izin Trayek Angkutan Barang	Izin Usaha	SICANTIK
64	Perizinan Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan Kab./ Kota	Izin Usaha	SICANTIK
65	Daftar Ulang Izin Trayek	Izin Usaha	SICANTIK
66	Izin Insidentil	Izin Usaha	SICANTIK
67	Izin Pool dan Agen	Izin Usaha	SICANTIK

1	2	3	4
68	Izin Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Izin Usaha	SICANTIK
69	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Izin Usaha	SICANTIK
70	Izin Mendirikan Bangunan tempat Pendaratan dan Lepas Helikopter	Izin Usaha	SICANTIK
71	Izin Pengumpulan Sumbangan	Izin Usaha	SICANTIK
72	Izin Operasional Panti Asuhan	Izin Usaha	SICANTIK
73	Izin Operasional Organisasi Sosial	Izin Usaha	SICANTIK
74	Izin Pengumpulan Uang dan Barang	Izin Usaha	SICANTIK
75	Izin Undian Berhadiah	Izin Usaha	SICANTIK
76	Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Karang Taruna	Izin Usaha	SICANTIK
77	Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Organisasi Sosial	Izin Usaha	SICANTIK
78	Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Penyandang Cacat	Izin Usaha	SICANTIK
79	Rekomendasi Bantuan Permaka dan Anak Panti dan Asrama SLB	Izin Usaha	SICANTIK
80	Rekomendasi Bantuan Pengiriman Pelatih Anak Putus Sekolah	Izin Usaha	SICANTIK
81	Rekomendasi Bantuan Pengiriman Lanjutan Jompo Terlantar	Izin Usaha	SICANTIK
82	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	Izin Usaha	SICANTIK
83	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	Izin Usaha	SICANTIK
84	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	Izin Usaha	SICANTIK
85	Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata	Izin Usaha	SICANTIK
86	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	Izin Usaha	SICANTIK
87	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	Izin Usaha	SICANTIK

1	2	3	4
88	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	Izin Usaha	SICANTIK
89	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	Izin Usaha	SICANTIK
90	Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	Izin Usaha	SICANTIK
91	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	Izin Usaha	SICANTIK
92	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	Izin Usaha	SICANTIK
93	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	Izin Usaha	SICANTIK
94	Tanda Daftar Usaha Spa	Izin Usaha	SICANTIK
95	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab./ Kota	Izin Usaha	SICANTIK
96	Izin Pembukaan Kantor Cab, Cab. Pembantu & Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab./ Kota	Izin Usaha	SICANTIK
97	Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rekomendasi	SICANTIK

Tabel 2. Daftar Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem Aplikasi *Online Single Submission* (OSS)

No	Perizinan dan Non Perizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui
1	2	3	4
1	Izin Lokasi Dlam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Izin Usaha	OSS
2	Izin Lingkungan	Izin Usaha	OSS
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Izin Usaha	OSS
4	Sertifikasi Laik Fungsi (SLF)	Izin Usaha	OSS
5	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	Izin Usaha	OSS
6	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Izin Usaha	OSS
7	Izin Usaha Obat Hewan	Izin Usaha	OSS

Laporan Semester II Juli - Desember 2021
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1	2	3	4
8	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	OSS
9	Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha	OSS
10	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	OSS
11	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)	Izin Usaha	OSS
12	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Usaha	OSS
13	Surat Izin Usaha Perikanan	Izin Usaha	OSS
14	Surat Izin Usaha Kecil & Mikro Obat Tradisional	Izin Usaha	OSS
15	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Izin Komersial/Operasional	OSS
16	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Komersial/Operasional	OSS
17	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial/Operasional	OSS
18	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Komersial/Operasional	OSS
19	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial/Operasional	OSS
20	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial/Operasional	OSS
21	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial/Operasional	OSS
22	Izin Apotek	Izin Usaha	OSS
23	Izin Toko Obat	Izin Usaha	OSS
24	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial/Operasional	OSS
25	Izin Usaha Industri (IUI)	Izin Usaha	OSS
26	Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Usaha	OSS
27	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	Izin Usaha	OSS
28	Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Usaha	OSS

1	2	3	4
29	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Izin Usaha Toko Swalayan/ Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	Izin Usaha	OSS
30	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)	Izin Usaha	OSS
31	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Usaha	OSS
32	Tanda Daftar Gudang	Izin Usaha	OSS
33	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	OSS
34	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Izin Usaha	OSS
35	Surat Izin Usaha Perikanan	Izin Usaha	OSS
36	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha	OSS
37	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	Izin Usaha	OSS

H. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar meliputi seluruh Perizinan dan Non Perizinan di Bidang:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penata Ruang;
4. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat;
5. Sosial;
6. Tenaga Kerja;
7. Lingkungan Hidup;
8. Perhubungan;
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Kebudayaan;
11. Kelautan dan Perikanan;
12. Pariwisata;
13. Pertanian;

14. Perdagangan;
15. Perindustrian;
16. Pemukiman; dan
17. Energi Sumberdaya Mineral.

I. SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang Profesional dan Kompeten di bidangnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Eselon III : 2 (dua) orang
2. Eselon IV : 6 (enam) orang
3. Staf PNS : 7 (tujuh) orang
4. Staf Non PNS : 13 (tiga belas) orang

J. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu:

1. Kantor Depan (*Front Office*);

- a. Loker Penerimaan
- b. Loker Penyerahan
- c. Loker Pembayaran
- d. Tempat Layanan Informasi
- e. Tempat Layanan Pengaduan

2. Kantor Belakang

- a. Ruang Pemrosesan
- b. Ruang Rapat

3. Ruang Pendukung/ Fasilitas Pendukung

- a. Ruang Tunggu
- b. Ruang Server
- c. Ruang Arsip

- d. Ruang Menyusui
- e. Ruang Bermain Anak
- f. Toilet
- g. Mushalla
- h. Tempat Parkir

4. Fasilitas Lainnya

- a. Seragam Pelayanan
- b. Formulir
- c. Telepon dan Mesin Faksimile
- d. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
- e. Server
- f. Mesin Antrian
- g. Pengukur Kepuasan Layanan (Aplikasi di Komputer)
- h. Kotak Pengaduan
- i. Kamera Pengawas (CCTV)
- j. Koneksi Internet (*wifi*)
- k. Laman / *website* dan *email*
- l. UPS (alat penyedia daya listrik)
- m. Alat pemadam kebakaran
- n. Pendingin Ruangan (AC)
- o. Televisi
- p. Brosur/Koran/Majalah
- q. Banner
- r. Petunjuk Arah Lokasi
- s. Pojok Gratis (Makanan dan Minuman)

Tabel 3. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Per-Sektor pada Semester II
 (Juli - Desember) Tahun 2021

NO	BIDANG PERIZINAN	BULAN						JUMLAH
		JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A							
1.	SEKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/I							
	1 SEKTOR PEMERINTAH DAERAH	63	23	80	164	162	180	672
	2 SEKTOR PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-	-
	3 SEKTOR KESEHATAN	97	34	98	81	82	115	507
2.	SEKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/II							
	1 SEKTOR PERTANIAN & PERKEBUNAN	1	1	2	-	-	1	5
	2 SEKTOR KOMUNIKASI & INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-
	3 SEKTOR PENDIDIKAN	3	-	5	10	8	20	46
3.	SEKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/III							
	1 SEKTOR PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-
	2 SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG & PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	23	36	39	42	40	80	260
II	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B							
1.	SEKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/I							
	1 SEKTOR PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-
	2 SEKTOR PETERNAKAN	-	-	-	-	1	-	1
	3 SEKTOR SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-
2.	SEKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/II							
	1 SEKTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-
	2 SEKTOR TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-
	3 SEKTOR PERTANAHAN	-	9	18	6	18	6	57
	4 SEKTOR ENERGI SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-	-
3.	SEKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/III							
	1 SEKTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	-	-	-	-	-	-	-
	2 SEKTOR PERIKANAN	-	-	-	1	-	-	1
	3 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	4	2	3	-	-	-	9
JUMLAH								1.558

Tabel 4. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Per-Kecamatan Se-Kabupaten Kampar pada Semester II (Juli - Desember) Tahun 2021.

NO	NAMA IZIN	KECAMATAN	BULAN						JUMLAH IZIN
			JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A									
I.	SEKTOR PEMERINTAH DAERAH								
1	IZIN PEMASANGAN REKLAME	XIII KOTO KAMPAR	-	-	2	-	2	6	
		BANGKINANG	4	1	4	9	6	4	
		BANGKINANG KOTA	5	3	10	23	16	17	
		GUNUNG SAHILAN	-	1	3	3	2	5	
		KAMPA	3	1	1	4	3	9	
		KAMPAR	5	-	2	12	14	9	
		KAMPAR KIRI	-	1	3	6	6	4	
		KAMPAR KIRI HILIR	2	-	-	1	2	2	
		KAMPAR KIRI HULU	-	1	-	-	1	1	
		KAMPAR KIRI TENGAH	2	-	5	3	4	2	
		KAMPAR UTARA	2	-	-	2	1	2	
		KOTO KAMPAR HULU	-	-	3	1	-	3	
		KUOK	-	-	3	7	9	6	
		PERHENTIAN RAJA	2	-	-	5	4	3	
		RUMBIO JAYA	-	-	-	6	4	3	
		SALO	2	-	1	3	10	1	
		SIK HULU	12	4	18	23	22	16	
		TAMBANG	8	5	10	22	23	17	
		TAPUNG	7	4	7	20	17	36	
		TAPUNG HILIR	4	1	5	7	9	24	
		TAPUNG HULU	5	1	3	7	7	10	
	JUMLAH		63	23	80	164	162	180	672
II.	SEKTOR PENANAMAN MODAL								
III.	SEKTOR KESEHATAN								
2	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM	BANGKINANG	-	-	1	-	1	1	
		BANGKINANG KOTA	-	-	-	1	5	1	
		KUOK	-	-	-	-	-	1	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	-	-	-	1	
		KAMPA	-	1	1	-	-	-	
		KAMPAR	-	2	-	2	1	7	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	1	-	
		GUNUNG SAHILAN	1	-	-	-	-	-	
		KAMPAR KIRI HULU	-	-	-	-	1	-	
		KAMPAR KIRI	1	-	-	-	-	-	
		KOTO KAMPAR HULU	1	-	1	-	1	-	
		SALO	3	-	-	-	-	1	
		SIK HULU	3	-	-	3	1	1	
		TAMBANG	-	1	1	1	1	-	
		TAPUNG	-	-	2	1	2	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TAPUNG HILIR	3	1	-	-	-	1	68
		TAPUNG HULU	-	-	3	2	-	-	
		JUMLAH	12	5	9	10	14	18	
3	IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI	BANGKINANG KOTA	-	-	-	1	1	1	16
		XIII KOTO KAMPAR	-	-	-	-	-	1	
		KAMPAR	1	-	2	1	-	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	-	1	
		KAMPAR UTARA	-	-	-	-	-	-	
		TAPUNG	-	-	-	-	-	1	
		SIK HULU	-	-	-	2	-	-	
		TAMBANG	1	-	-	2	-	-	
		TAPUNG HULU	-	-	1	-	-	-	
		JUMLAH	2	-	3	6	1	4	16
4	IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	BANGKINANG KOTA	-	-	-	1	-	-	15
		KAMPAR	1	-	1	1	-	1	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	-	1	-	
		SIK HULU	3	-	-	1	-	2	
		TAPUNG HULU	-	-	2	1	-	-	
		JUMLAH	4	-	3	4	1	3	15
5	IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP	BANGKINANG KOTA	-	-	12	-	-	-	26
		TAPUNG	-	-	-	-	-	14	
		JUMLAH	-	-	12	-	-	14	
6	IZIN PRAKTIK BIDAN	XIII KOTO KAMPAR	2	-	-	-	-	1	105
		BANGKINANG KOTA	1	5	2	5	1	5	
		BANGKINANG	4	-	-	1	-	-	
		KAMPAR	2	-	3	1	-	15	
		GUNUNG SAHILAN	-	-	2	1	4	1	
		KAMPAR KIRI	4	-	-	-	-	4	
		KAMPAR UTARA	1	-	-	-	-	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	1	-	-	-	-	2	
		KAMPA	-	-	-	-	1	1	
		SIK HULU	3	-	3	-	1	2	
		SALO	-	-	-	-	-	2	
		TAMBANG	-	1	-	2	-	-	
		RUMBIO JAYA	-	-	-	-	1	-	
		TAPUNG	2	2	2	2	1	2	
		TAPUNG HILIR	1	-	1	-	-	4	
		TAPUNG HULU	-	-	-	1	1	1	
		JUMLAH	21	8	13	13	10	40	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	IZIN PRAKTIK PERAWAT	BANGKINANG	-	-	2	2	1	-	94
		BANGKINANG KOTA	1	1			4	1	
		KAMPAR KIRI	1	-	1	-	2	-	
		KAMPAR UTARA	-	-	-	-	9	-	
		SALO	-				2	1	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	1	-	-	
		KAMPAR	8	4	5	1	7	4	
		KAMPA	-	-	-	2	-	-	
		SIK HULU	3	2	3	2	1	1	
		KOTO KAMPAR HULU	-	-	-	-	-	-	
		RUMBIO JAYA	-	-	1	-	1	-	
		TAPUNG	1	-	1	1	-	1	
		TAPUNG HILIR	-	1	-	-	1	-	
	TAPUNG HULU	2	1	2	4	4	1		
JUMLAH		16	9	15	13	32	9		
8	IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI	BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	-	1	3
		SALO	-	-	-	-	-	1	
		KAMPAR	-	1	-	-	-	-	
	JUMLAH		-	1	-	-	-	2	
9	IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI								1
		SIK HULU	1	-	-	-	-	-	
JUMLAH		1	-	-	-	-	-		
10	IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS								2
		BANGKINANG KOTA	-	-	1	1	-	-	
JUMLAH		-	-	1	1	-	-		
11	IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KAMPAR	3	-	-	-	-	-	14
		KAMPA	-	-	-	-	-	1	
		BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	-	3	
		SIK HULU	-	-	1	1	-	-	
		TAPUNG HILIR	1	-	-	-	-	-	
		TAPUNG HULU	1	-	-	-	1	-	
		TAPUNG		-	-	-	-	1	
	XIII KOTO KAMPAR	1	-	-	-	-	-		
JUMLAH		6	-	1	1	1	5		
12	IZIN PRAKTIK APOTEKER	BANGKINANG KOTA	1	1	1	1	1	2	
		BANGKINANG	-	-	-	2	-	-	
		KUOK	-	-	-	-	-	1	
		SALO	1	-	-	-	-	-	
		KAMPAR	4	-	3	1	-	1	
		PERHENTIAN RAJA	1	-	1	-	-	-	
		RUMJIO JAYA	1	1	-	-	-	-	
		SIK HULU	1	2	3	2	-	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TAMBANG	5	-	2	3	1	-	56
		TAPUNG	2	-	1	1	-	2	
		TAPUNG HILIR	1	1	1	-	-	-	
		TAPUNG HULU	2	-	-	-	-	1	
		JUMLAH	19	5	12	10	2	8	
13	IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	KAMPAR	-	-	4	3	1	3	20
		KAMPA	-	-	-	-	-	1	
		BANGKINANG	-	-	-	-	-	1	
		XIII KOTO KAMPAR	-	-	-	1	-	-	
		TAPUNG HULU	-	-	-	1	-	1	
		BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	1	-	
		SIK HULU	-	-	3	-	-	-	
		JUMLAH	-	-	7	5	2	6	
14	IZIN KERJA TEKNISI GIGI	KAMPAR	-	-	-	1	-	-	1
		JUMLAH	-	-	-	1	-	-	
15	IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	BANGKINANG KOTA	-	-	-	1	-	-	1
		JUMLAH	-	-	-	1	-	-	
16	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)	SIK HULU	1	-	-	-	-	-	11
		TAMBANG	1	-	-	-	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	1	-	-	
		XIII KOTO KAMPAR	-	-	-	2	-	-	
		TAPUNG	-	-	-	-	1	-	
		KAMPAR	-	-	-	1	-	-	
		KAMPA	-	-	-	1	-	-	
		SALO	-	-	-	1	-	-	
		BANGKINANG	-	-	1	-	-	-	
		BANGKINANG KOTA	1	-	-	-	-	-	
		JUMLAH	3	-	1	6	1	-	
17	IZIN PEREKAM MEDIS	BANGKINANG KOTA	-	-	1	-	-	-	8
		KAMPAR	-	-	6	1	-	-	
		JUMLAH	-	-	7	1	-	-	
18	IZIN KERJA RADIOGRAFER	TAPUNG HULU	-	-	-	1	-	-	1
		JUMLAH	-	-	-	1	-	-	
19	IZIN OPERASIONAL KLINIK	TAMBANG	1	-	-	-	-	-	
		BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	1	1	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	1	-	-	-	
		KAMPAR	1	-	-	-	-	-	
		XIII KOTO KAMPAR	-	-	-	1	1	-	
		TAPUNG HILIR	-	-	-	-	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TAPUNG HULU	-	-	1	-	1	-	15
		TAPUNG	-	1	-	1	-	2	
	JUMLAH		2	1	2	2	4	4	
20	IZIN APOTEK	SIK HULU	-	1	-	-	-	-	35
		KAMPA	-	-	1	-	1	-	
		TAPUNG	4	1	1	-	-	1	
		TAPUNG HULU	1	-	-	-	-	-	
		KAMPAR KIRI	1	-	-	1	-	-	
		TAMBANG	-	2	1	4	1	-	
		SIK HULU	-	-	3	-	2	-	
		TAPUNG HILIR	-	-	1	-	-	-	
		RUMBIO JAYA	-	-	2	-	-	-	
		TAPUNG HULU	-	-	1	-	-	-	
		BANGKINANG	-	-	-	-	1	-	
	BANGKINANG KOTA	1	1	1	-	1	-		
JUMLAH		7	5	11	5	6	1		
21	IZIN TOKO OBAT	TAPUNG HULU	-	-	-	-	1	-	3
		BANGKINANG KOTA	-	-	-	1	-	-	
		TAMBANG	-	-	1	-	-	-	
	JUMLAH		-	-	1	1	1	-	
22	IZIN TERAFIS GIGI & MULUT	SALO	-	-	-	-	1	-	8
		KAMPAR	-	-	-	-	2	-	
		KAMPA	-	-	-	-	1	-	
		RUMBIO JAYA	-	-	-	-	1	-	
		TAPUNG HILIR	-	-	-	-	1	1	
		BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	1	-	
	JUMLAH		-	-	-	-	7	1	
23	IZIN USAHA LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM	SIK HULU	-	-	1	-	-	-	2
		TAPUNG HULU	1	-	-	-	-	-	
	JUMLAH		1	-	1	-	-	-	
24	IZIN RUMAH MAKAN DAN RESTORAN	XIII KOTO KAMPAR	1	-	-	-	-	-	2
		TAMBANG	1	-	-	-	-	-	
	JUMLAH		2	-	-	-	-	-	
IV. SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN									
25	IZIN USAHA PERKEBUNAN	KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	-	-	-	1	5
		SIK HULU	-	-	1	-	-	-	
		TAPUNG HULU	-	-	1	-	-	-	
		TAPUNG HILIR	1	1	-	-	-	-	
JUMLAH		1	1	2	-	-	1		
V. SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	SEKTOR PENDIDIKAN								
26	IZIN OPERASIONAL TK DAN PAUD	TAMBANG	1	-	1	2	2	9	34
		TAPUNG	-	-	-	1	1	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	1	-	-	
		KAMPAR KIRI HILIR	-	-	-	-	1	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	1	-	-	
		KOTO KAMPAR HULU	-	-	-	-	3	-	
		KAMPAR	-	-	-	1	-	3	
		RUMBIO JAYA	2	-	-	1	-	-	
		SIK HULU	-	-	2	1	-	1	
	JUMLAH		3	-	3	8	7	13	34
27	IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SD DAN SMP	KAMPAR	-	-	1	-	-	1	12
		TAMBANG	-	-	-	-	1	2	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	1	-	-	-	
		SIK HULU	-	-	-	-	-	2	
		GUNUNG SAHLAN	-	-	-	-	-	1	
		BANGKINANG KOTA	-	-	-	1	-	-	
		TAPUNG HILIR	-	-	-	1	-	1	
	JUMLAH		-	-	2	2	1	7	12
VII.	SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
VIII.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG & PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
28	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	BANGKINANG KOTA	3	4	1	2	-	3	260
		BANGKINANG	1	2	-	-	1	-	
		XIII KOTO KAMPAR	1	-	-	-	2	-	
		KAMPA	-	-	2	2	-	-	
		KAMPAR	-	-	1	-	-	3	
		GUNUNG SAHLAN	-	-	-	-	-	2	
		KAMPAR KIRI TENGAH	1	-	1	-	1	1	
		KAMPAR KIRI HILIR	1	-	-	1	1	1	
		KAMPAR KIRI	1	-	-	1	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	2	1	1	1	-	1	
		SIK HULU	3	5	15	8	12	14	
		TAMBANG	8	14	6	21	11	29	
		TAPUNG	1	5	8	3	11	12	
		KOTO KAMPAR HULU	-	-	-	1	-	-	
		TAPUNG HULU	-	-	3	-	1	10	
		TAPUNG HILIR	1	5	1	1	-	4	
		SALO	-	-	-	1	-	-	
	JUMLAH		23	36	39	42	40	80	260
	JUMLAH IZIN								1.490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B									
I.	SEKTOR PERHUBUNGAN								
II.	SEKTOR PETERNAKAN								
1	IZIN USAHA PETERNAKAN	KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	-	-	1	-	
	JUMLAH		-	-	-	-	1	-	1
III.	SEKTOR SOSIAL								
IV.	SEKTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA								
V.	SEKTOR TENAGA KERJA								
VI.	SEKTOR PERTANAHAN								
3	IZIN LOKASI / IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)	KAMPA	-	-	6	-	-	-	
		KAMPAR UTARA	-	1	-	-	1	-	
		TAPUNG HULU	-	1	-	-	-	-	
		TAMBANG	-	-	3	3	2	4	
		TAPUNG	-	2	2	1	10	1	
		BANGKINANG KOTA	-	1	3		1	1	
		SIK HULU	-	4	4	2	4	-	
	JUMLAH		-	9	18	6	18	6	57
VII.	SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MANUSIA								
VIII.	SEKTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH								
IX.	SEKTOR PERIKANAN								
4	IZIN USAHA PERIKANAN	TAPUNG	-	-	-	1	-	-	
	JUMLAH		-	-	-	1	-	-	1
X.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP								
5	IZIN LINGKUNGAN	TAMBANG	1	-	-	-	-	-	
		TAPUNG	-	1	-	-	-	-	
		TAPUNG HULU	-	-	1	-	-	-	
	JUMLAH		1	1	1	-	-	-	3
6	IZIN LIMBAH CAIR	BANGKINANG KOTA	1	-	-	-	-	-	
	JUMLAH		1	-	-	-	-	-	1
7	IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	BANGKINANG KOTA	1	-	-	-	-	-	
	JUMLAH		1	-	-	-	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	PERSETUJUAN PROPOSAL PERUMAHAN MBR	TAMBANG	-	1	1	-	-	-	
		TAPUNG	-	-	1	-	-	-	
		SIAK HULU	1	-	-	-	-	-	
	JUMLAH		1	1	2	-	-	-	4
JUMLAH IZIN									68
TOTAL IZIN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A & B									1.558

BANGKINANG, 03 JANUARI 2022

KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN



ELFAUZAN, S. Hut
NIP. 19731120 199403 1 003

KASI PELAPORAN DAN
PENINGKATAN LAYANAN



YESSY ANWAR, S. Si
NIP. 19800925 201001 2 003

Mengetahui,

KEPALA DINAS,



HAMBALI, SE. MH
NIP. 19681024 200003 1 002

K. LAYANAN PENGADUAN

Untuk melayani pengaduan masyarakat terkait permasalahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, telah dibentuk loket layanan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara:

1. Langsung

Masyarakat dapat langsung mengunjungi loket layanan pengaduan yang sudah tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar dan mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan (formulir terlampir).

2. Melalui telepon/SMS ke Nomor: 0812-7646-0487

3. Melalui website : www.dpmptsp.kamparkab.go.id &
www.lapor.go.id

Pengaduan yang masuk ke layanan pengaduan Semester II dari bulan Juli - Desember Tahun 2021 pada tabel berikut :

**REKAP PENANGANAN PENGADUAN DPM-PTSP KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**

NO	PELAPOR PENGADUAN	NO/TGL SURAT PENGADUAN	TERLAPOR	JENIS PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	PT. TRANSFORMASI SEJAHTERA INDONESIA	S- 0135/TSI/VIII/202 1 16 Agustus 2021	CV. Kayla Utama Jaya	Klarifikasi Izin dan NIB CV. Kayla Utama Jaya	1. Setelah surat pengaduan diterima, maka dipelajari dan diberi jawaban atas pertanyaan pengadu/pelapor. 2. Jawabannya dikirim melalui surat dengan Nomor Surat 700/DPMPTSP-PKPL/439 3. Penanganan Selesai	Penanganan Selesai
2	Kepala Desa Tanjung Berulak	145/TB- VIII/2021/77 27 Agustus 2021	RSIA Bunda Anisyah	Permohonan penjelasan tentang IMB dan Izin Operasional RSIA Bunda Anisyah	1. Dilakukan Monitoring / turun lapangan ke RSIA Bunda Anisyah bersama Pihak Satpol PP dan OPD terkait dengan Nomor SPT 094/DPM-PTSP/2021/337 2. Hasil dari monitoring tersebut, maka pihak Satpol PP menyegel Bangunan yang memang belum memiliki izin. 3. masih dalam proses dan masih ditindaklanjuti. 4. Penanganan Selesai	Penanganan Selesai
3	Huzairin	02-Sep-21	Herman	Tentang Izin Mendirikan Bangunan Ruko	1. Dilakukan Monitoring / turun lapangan ke Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu dengan Nomor SPT 094/DPMPTSP/347 2. Dari hasil monitoring, ada beberapa pertanyaan dari pelapor dan sudah dijawab secara langsung. 3. masih dalam proses 4. Penanganan Selesai	Penanganan Selesai

4	Nazarudin	20-Sep-21	INDOMARET	Petisi menolak berdirinya Indomaret di Desa Kualu	1. Tidak ada Monitoring, karena Toko Indomaret di Desa Kualu belum mengajukan Izin ke DPMPTSP Kab. Kampar. 2. Pihak Indomaret hanya memiliki izin Rekomendasi dari Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMK 3. Telah dilakukan pertemuan di Kantor Camat Tambang pada Hari Kamis 4 November 2021 bersama dengan PT. INDOMARCO PRISTAMA, Kabid Satpol PP, Mahasiswa, Kadus RT RW Desa Kualu dan warga desa setempat. 4. Penanganan Selesai.	Penanganan Selesai
5	Diana	21-Sep-21	-	Tentang Perubahan Pengurusan Secara Online IMB Perumahan	1. Pengaduan dilakukan secara Online Via Whatsapp. 2. Pelapor/pengadu sudah datang langsung ke Kantor DPMPTSP dan sudah diberi Penjelasan. 3. Penanganan Selesai.	Penanganan Selesai
6	Asyrofil Anam	Melalui Website	-	Keluhan tentang SOP terbitnya Izin	1. Sudah mengirim balasan pengaduan melalui email 2. Penanganan Selesai	Penanganan Selesai
7	Mukhidin (Kepala Desa Gunung Mulya)	373/PEM-GM/X/2021 19 Oktober 2021	PT. SURYA AGROLIKA REKSA	Konfirmasi Izin IMB yang telah terbit atas nama PT. Surya Agrolika Reksa (SAR)	1. Sudah diberi jawaban dan klarifikasi kepada Kepala Desa Gunung Mulya. 2. Penanganan Telah Selesai.	Penanganan Selesai
8	Warga Perumahan Mahang Raya	Via Whatsapp 27 Oktober 2021	-	Penutupan jalan umum dalam area perumahan secara sepihak dengan portal dan dijadikan gudang muat bongkar kayu.	-	Tidak Perlu Tindak Lanjut
9	FARID (Humas Indomaret)	Langsung 29 Oktober 2021	-	Konsultasi mengenai OSS RBA	1. Sudah diberi jawaban dan penjelasan langsung. 2. Penanganan Telah Selesai.	Penanganan Selesai
10	Media Online Kicaun Nusantara. Com	015/MO-KN/KT/XI/2021 22 November 2021	-	Konfirmasi Tertulis	-	Tidak Perlu Tindak Lanjut

L. INOVASI

Inovasi dalam artian Inovasi Pelayanan Publik merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar mempunyai 6 (enam) jenis inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai antara lain:

1. Kojou IKM;
Kuesioner jemput data oleh petugas perizinan untuk mendapatkan **Indek Kepuasan Masyarakat** dalam Wilayah Kabupaten Kampar.
2. Layout UMKM;
Layanan berbantuan OSS Untuk pelaku UMKM.
3. Mambolo;
Inovasi Pelayanan Perizinan Prioritas MAMBOLO OSS pada pelaku usaha (**Membenahi Aktifitas Perizinan Mandiri Berusaha** melalui **OSS**).
4. Paibo;
Penyediaan media Informasi Banner OSS Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik.
5. Sadar;
Penyajian buku **Statistik Data Perizinan dan Nonperizinan** Kabupaten Kampar.
6. Tracking Perizinan Online;
7. Pelayanan pelayanan perizinan Tracking Perizinan Online bagi pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan.

M. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menjadi pedoman untuk mengukur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Dalam Survei Kepuasan Masyarakat telah dilakukan Survei Internal terhadap masyarakat yang respondennya di ambil secara acak dengan Blanko

Quisioner terlampir. Dari survei kepuasan masyarakat dari bulan Juli - Desember 2021 terdapat jumlah 178 dengan jumlah responden yaitu:

- Laki-laki 114 orang
- Perempuan 64 orang

Maka diperoleh Nilai IKM dari (Juli – Desember) Tahun 2021 adalah **87,88** dengan kategori **Baik**.

Tabel 6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II (Juli - Desember) Tahun 2021

NO	BULAN	NILAI SKM	KATEGORI
1	2	3	4
1	Juli	84,06	Baik
2	Agustus	89,45	Sangat Baik
3	September	88,25	Baik
4	Oktober	83,82	Baik
5	November	89,80	Sangat Baik
6	Desember	91,95	Sangat Baik
IKM Juli - Desember		87,88	Baik

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data perizinan Semester II (Juli- Desember) dibandingkan Semester I (Januari-Juni) Tahun 2021, Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Kampar mengalami peningkatan $\pm 29\%$. Hal disebabkan tingginya antusiasme pelaku usaha dalam hal pengurusan perizinan berusaha.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar masih terdapat kendala diantaranya :

1. Masih adanya pemohon yang tidak menindaklanjuti dengan cepat untuk kelengkapan kekurangan persyaratan perizinan (lengkap dan benar) termasuk rekomendasi dari dinas teknis terkait.
2. Keterlambatan penyelesaian pengesahan/persetujuan dokumen pendukung dari instansi teknis seperti UKL-UPL, AMDAL, ANDALALIN dan Dokumen lainnya.
3. Adanya *maintenance* pada aplikasi SICANTIK dan OSS RBA dari pusat dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.
 - a. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dengan aplikasi SICANTIK Cloud di Semester II (Juli-Desember) Tahun 2021 berjumlah **1.558** dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A yaitu **1.490** Izin.
 - 2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B yaitu **68** Izin.
 - b. Berdasarkan data dari *website* <https://nswi.bkpm.go.id/>. Untuk periode Semester II bulan Juli Tahun 2021 diperoleh data sesuai table di bawah ini yang tersebar pada 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar (data terlampir).

1) Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Tabel 7. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Semester II (Juli) Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah NIB	Jumlah Proyek/Kegiatan Usaha
1	2	3	4
1	Juli	325	345
Jumlah		325	345

2) Perorangan dan Non-Perorangan

Tabel 8. Perorangan dan Non-Perorangan Semester II (Juli) Tahun 2021

No	Bulan	NIB	Proyek	Komitmen	Izin Usaha	Izin Operasional/ Komersial
1	2	3	4	5	6	7
1	Juli	39	255	565	412	10
Jumlah		39	255	565	412	10

- c. Dan berdasarkan Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kab. Kampar periode Agustus – Desember Tahun 2021 di peroleh data sesuai table dibawah ini yang tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar (data terlampir).

Tabel 9. Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kab. Kampar Semester II (Agustus - Desember) Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah NIB	Sebaran Proyek Berdasarkan Risiko
1	2	3	4
1	Agustus	357	466
2	September	654	1.092
3	Oktober	515	866
4	November	471	1.008
5	Desember	426	937
Jumlah		2.423	4.369

- d. Untuk pelayanan pengaduan terdapat 10 (sepuluh) kasus dari bulan (Juli - Desember) Tahun 2021 dengan 8 (delapan) kasus penanganan selesai dan 2 (dua) kasus tidak perlu tindak lanjut.
- e. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk bulan (Juli-Desember) Tahun 2021 yaitu **87,88** masih dengan kategori **Baik**. Hal ini perlu ditingkatkan untuk pencapaian dengan kategori Sangat Baik dalam peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perizinan berusaha harus cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif dan efisien.
2. Unit pelayanan harus tetap mengacu pada standar pelayanan yang merupakan jaminan dan kepastian baik bagi penyelenggara dalam memberikan maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan, sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha terkait peraturan ataupun kebijakan baru.
3. Dengan telah diberlakukan nya OSS RBA dan launching pada tanggal 09 Agustus 2021, maka sangat perlu dilakukan Sosialisasi OSS-RBA secara kontinu kepada masyarakat/pelaku usaha karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan OSS versi 1.1.
4. Memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait terhadap standar pelayanan.
5. Informasi yang diberikan kepada pelaku usaha harus benar dan tepat.
6. Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dengan cara izin dipermudah dan pengawasan diperketat artinya evaluasi dan pengawasan internal secara berkala dan terus menerus harus dilakukan

Bangkinang Kota, 30 Desember 2021

KEPALA DINAS,



HAMPALI, SE. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19681024 200003 1 002

FILTER

Tanggal Awal
01-Jul-21

Tanggal Akhir
31-Jul-21

klik *icon* dibawah
untuk melihat
rekapitulasi data



DASHBOARD OSS - Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) - DPMPTSP Kabupaten Kampar

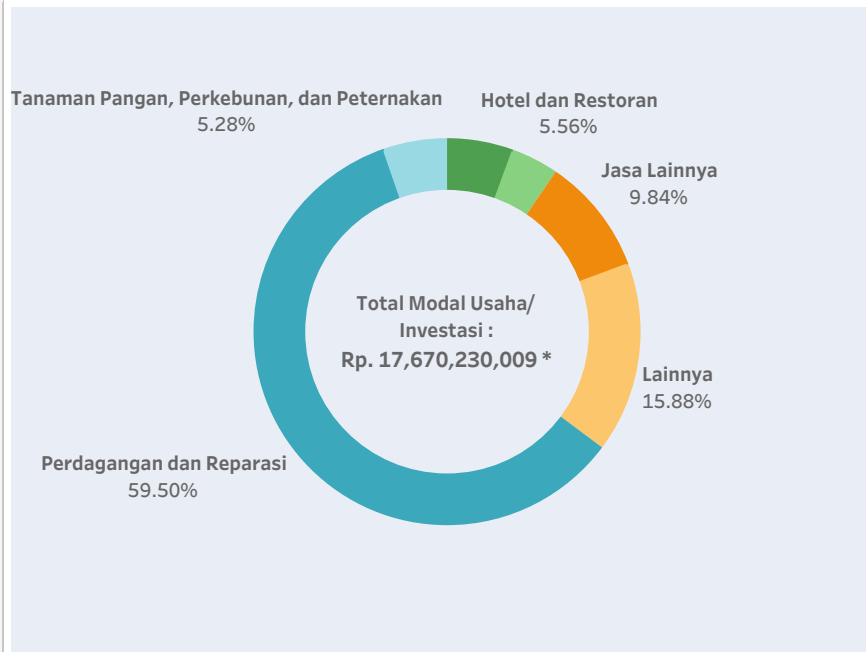
Periode 01-Jul-21 s/d 31-Jul-21

Jumlah NIB
325

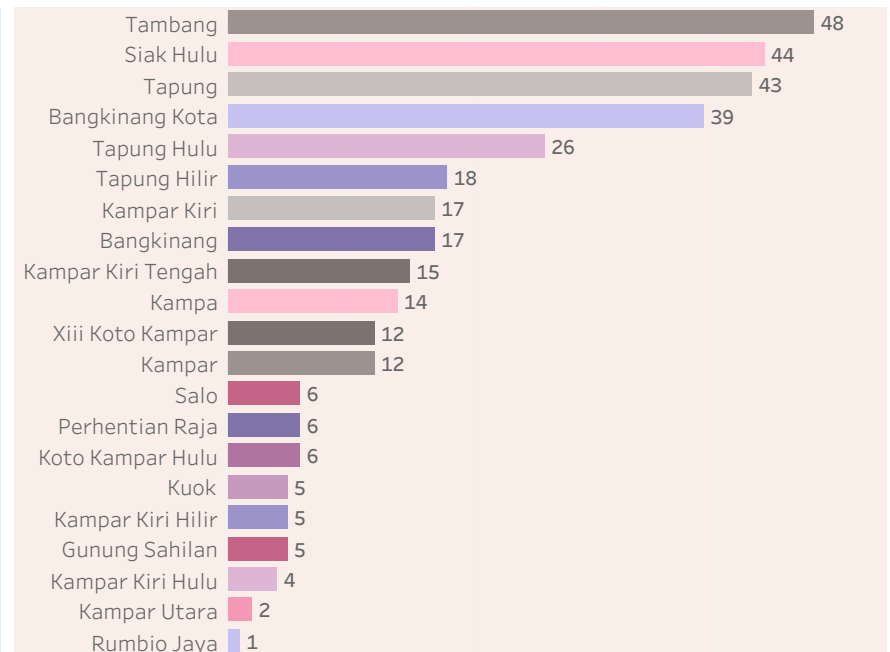
Jumlah Proyek/
Kegiatan Usaha
345



Top 5 Sektor Berdasar Modal Usaha/Investasi **



Statistik Jumlah Proyek/Kegiatan Usaha per Kecamatan **



catatan :

* data modal usaha/investasi sesuai dengan isian pelaku usaha di OSS dengan konsep *self declare*

** grafik sektor & kecamatan bisa menjadi *filter* data lain dengan cara klik pada data yang diinginkan

FILTER

Tanggal Awal

01-Jul-21

Tanggal Akhir

31-Jul-21



DASHBOARD OSS (Perorangan & Non-Perorangan) DPMPSTSP Kabupaten Kampar

Periode 01-Jul-21 s/d 31-Jul-21

NIB :

39

Proyek :

255

Komitmen :

565

Izin Usaha :

412

Izin
Operasional/Komersial :

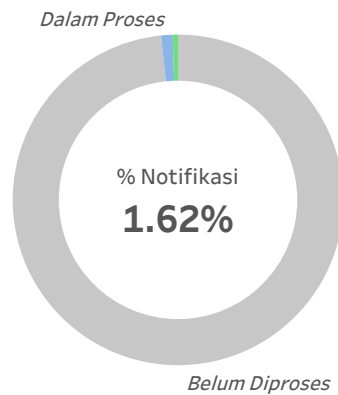
10



Untuk melihat **detail data**, silahkan klik salah satu box jenis data diatas, lalu pilih **Lihat Rekapitulasi -datanya-**.

catatan : data yang muncul diatas hanya atas perizinan yang menjadi kewenangan anda.

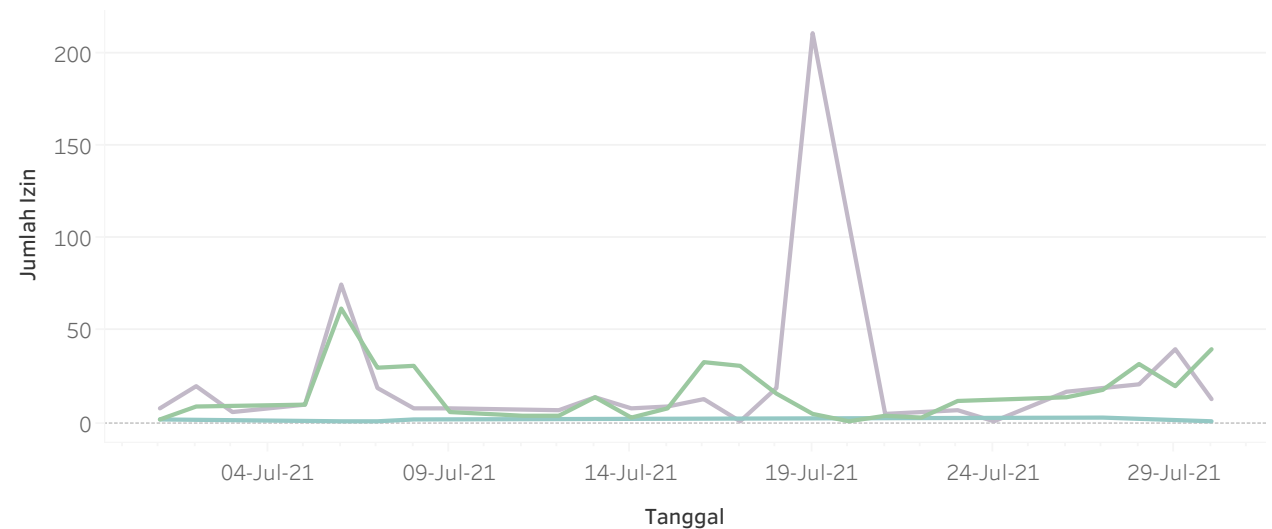
Resume Notifikasi



Status :

- Belum Diproses
- Dalam Proses
- Disetujui

Statistik Pengajuan Izin



Jenis

Izin Usaha

Izin Operasional/Komersial

Komitmen Sarana/Prasara..

357
MIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha

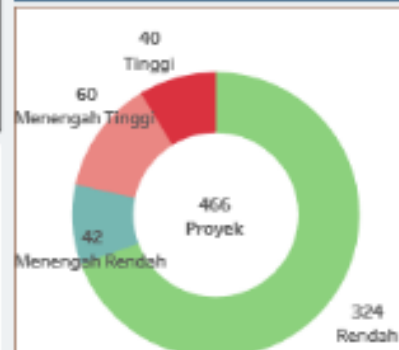
357

PMDN

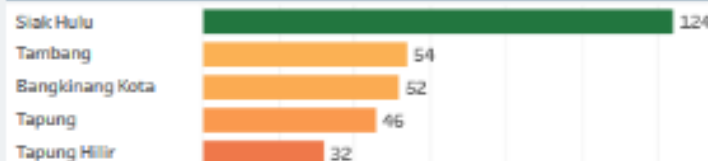
357

Non UMK

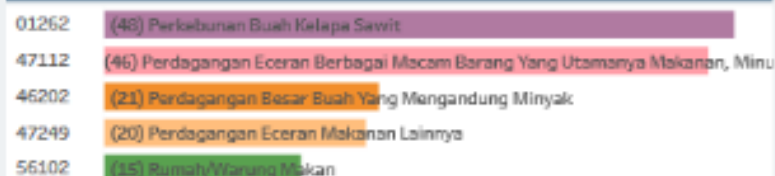
Sebaran Proyek berdasarkan Risiko



Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha



Top 5 KBLI



Filter

Tanggal Awal

04/08/2021

Tanggal Akhir

31/08/2021

Data Update: 06/01/2022 01.07.29

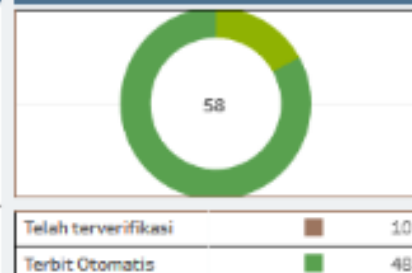
Detail Proyek

Detail Perizinan Berusaha

Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis



Status Perizinan



Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

654
NIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha

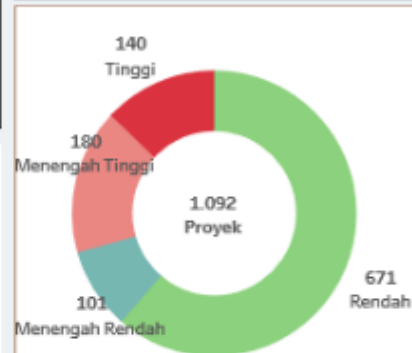
654

PMDN

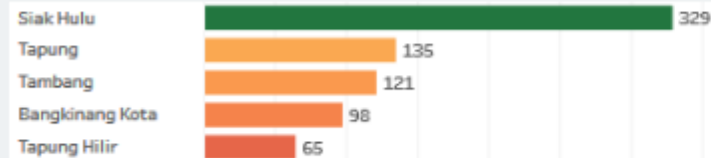
654

Non UMK

Sebaran Proyek berdasarkan Risiko



Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha



Top 5 KBLI



Filter

Tanggal Awal

01/09/2021

Tanggal Akhir

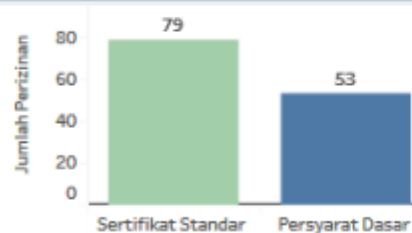
30/09/2021

Data Update: 06/01/2022 01.07.29

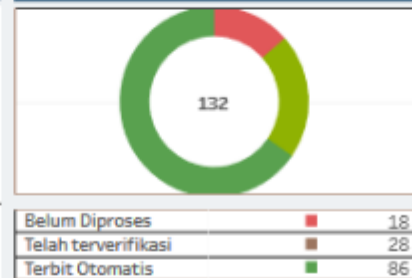
Detail Proyek

Detail Perizinan Berusaha

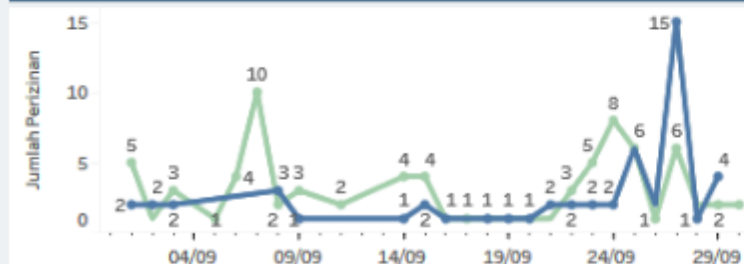
Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis



Status Perizinan



Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

515
NIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha

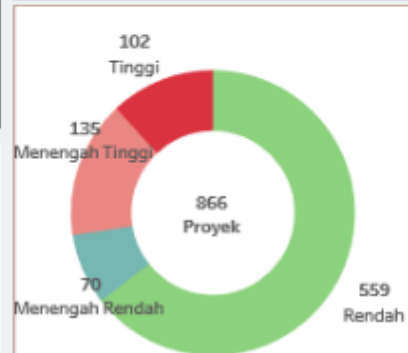
515

515

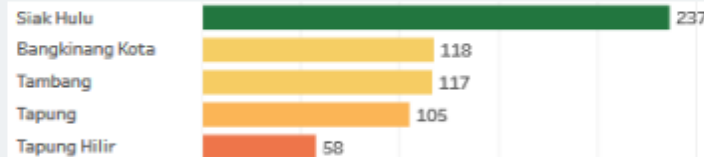
PMDN

Non UMK

Sebaran Proyek berdasarkan Risiko



Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha



Top 5 KBLI



Filter

Tanggal Awal

01/10/2021

Tanggal Akhir

31/10/2021

Data Update: 06/01/2022 01.07.29

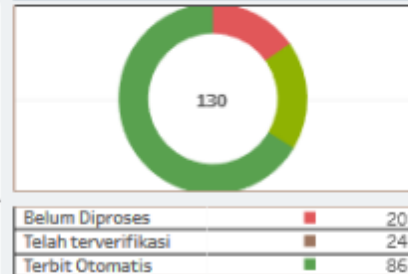
Detail Proyek

Detail Perizinan Berusaha

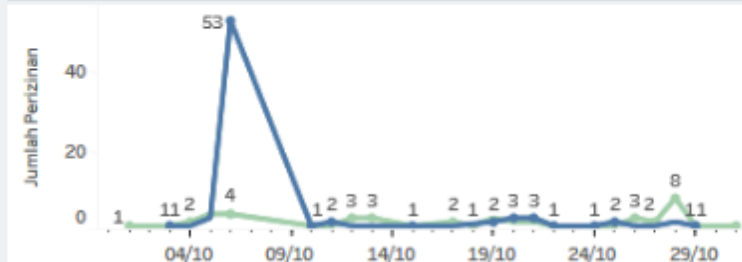
Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis



Status Perizinan

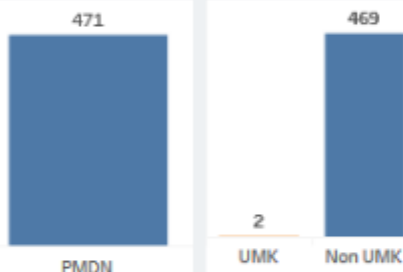


Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari

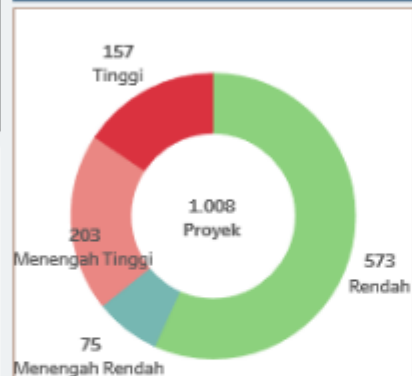


KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

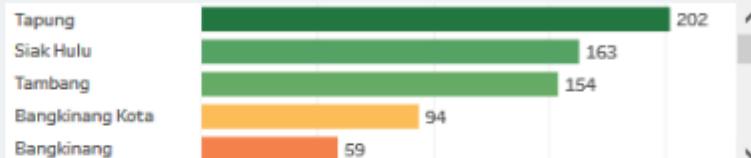
471
NIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha



Sebaran Proyek berdasarkan Risiko



Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha



Top 5 KBLI



Filter

Tanggal Awal

01/11/2021

Tanggal Akhir

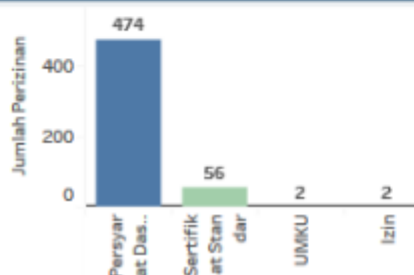
30/11/2021

Data Update: 06/01/2022 01.07.29

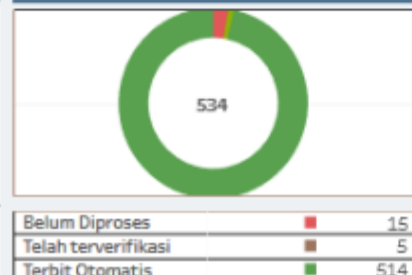
Detail Proyek

Detail Perizinan Berusaha

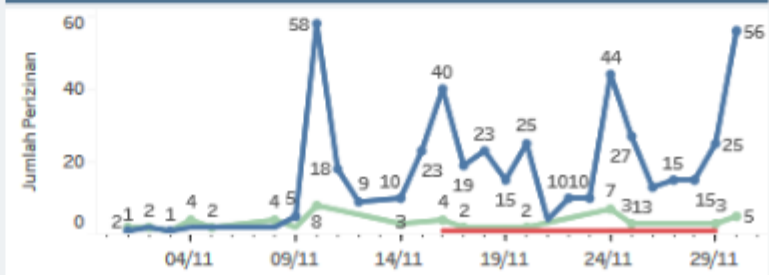
Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis



Status Perizinan



Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

426
NIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha

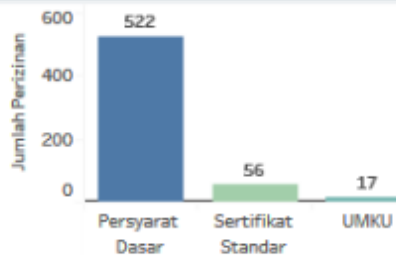
426

PMDN

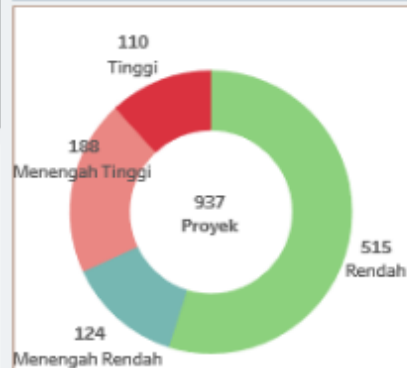
426

Non UMK

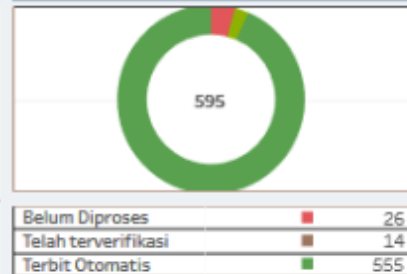
Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis



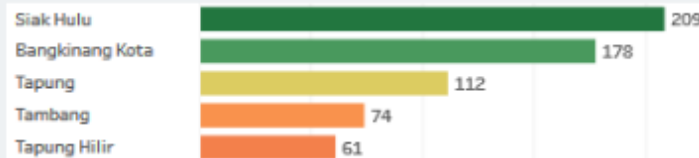
Sebaran Proyek berdasarkan Risiko



Status Perizinan



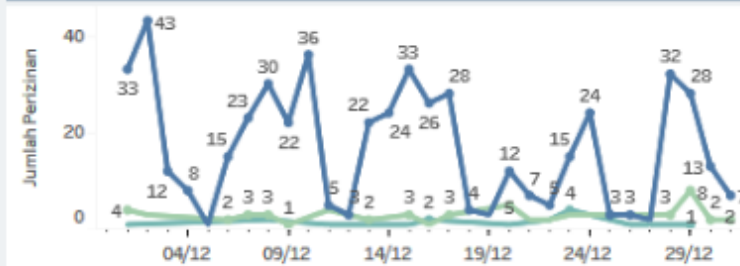
Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha



Top 5 KBLI



Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari



Filter

Tanggal Awal

01/12/2021

Tanggal Akhir

31/12/2021

Data Update: 06/01/2022 01.07.29

Detail Proyek

Detail Perizinan Berusaha



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM



BIDANG PENGADUAN, KENIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN

Jalan Prof. M. Yamin, No. 16 Bangkinang website : dpmptsp.kampar.go.id
Email : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411